IUSTITIA DEI: JURNAL TEOLOGI DAN AGAMA
Vol. 1, No. 1, pp.40-51 | doi: 10.62926/jid.v1i1.15
p-ISSN: , e-ISSN: 3165-1739
Website: **https://ejurnal.stthkbp-pematangsiantar.ac.id/index.php/jid**

Gereja Sebagai Komunitas *Shalom*: Respons Eklesiologis terhadap Krisis Perdamaian dalam SDG 16

Alfonco Exaudi Purba✉
Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematangsiantar
alfoncopurba@gmail.com
087898509260

ABSTRACT
Social peace crises marked by armed conflict, political polarization, corruption, intolerance, disinformation, and declining public trust reveal that peace extends beyond the absence of conflict to the quality of communal life. This study analyzes the church as a shalom community from an ecclesiological perspective and its contribution to Sustainable Development Goal (SDG) 16. Using a qualitative literature review and descriptive-interpretative analysis of biblical, theological, and SDG literature, the study identifies relational brokenness, weakened solidarity, injustice, and declining social trust as key dimensions of peace crises. Based on these findings, the church as a shalom community is constructed through four ecclesiological responses: reconciliation and relational restoration, justice and social solidarity, dialogue and public participation, and peace formation through education and communal life. These responses affirm that the church's contribution to SDG 16 is an expression of its ecclesial identity and mission. Thus, the church is positioned as both a faith community and an active social actor in building peaceful, just, and inclusive communities.

ABSTRAK
Krisis perdamaian sosial yang ditandai konflik bersenjata, polarisasi politik, korupsi, intoleransi, disinformasi, dan menurunnya kepercayaan publik memperlihatkan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan konflik, tetapi juga dengan kualitas kehidupan bersama. Penelitian ini menganalisis gereja sebagai komunitas *shalom* dalam perspektif eklesiologi dan kontribusinya terhadap *Sustainable Development Goal* (SDG) 16. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-interpretatif terhadap Alkitab, literatur teologis, dan dokumen SDGs. Hasil penelitian menemukan bahwa krisis perdamaian berakar pada kerusakan relasi, melemahnya solidaritas, ketidakadilan, dan menurunnya kepercayaan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, gereja sebagai komunitas *shalom* dikonstruksi melalui empat respons eklesiologis: rekonsiliasi dan pemulihan relasi, keadilan dan solidaritas sosial, dialog dan partisipasi publik, serta pembentukan perdamaian melalui pendidikan dan kehidupan komunal. Respons tersebut menegaskan bahwa kontribusi gereja terhadap SDG 16 merupakan perwujudan identitas dan misi gereja. Gereja diposisikan sebagai komunitas iman sekaligus aktor sosial dalam membangun kehidupan yang damai, adil, dan inklusif.

OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY
Received:
27-04-2026

Accepted:
30-10-2026

KEYWORDS
church, shalom, ecclesiology, social peace, SDG 16

KATA KUNCI
gereja, shalom, eklesiologi, perdamaian sosial, SDG 16

E-mail Corresponding: ✉alfoncopurba@gmail.com
© 2026 The Author(s).

Pendahuluan

Menurut Camorongan (2023, hlm.36) Perdamaian merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan melalui Agenda 2030, khususnya Tujuan 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*), yang menekankan pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif, penyediaan akses terhadap keadilan, serta pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkat (United Nations, 2026). SDG 16 sebagai fondasi yang menopang pencapaian berbagai tujuan pembangunan lainnya, termasuk upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kesetaraan, serta pelestarian lingkungan hidup (Radovic, 2019, hlm.26). Kuenkel et al. (2020, hlm.2) Keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan setiap negara membangun kehidupan sosial yang damai, adil, serta ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Fakta global memperlihatkan bahwa cita-cita perdamaian masih jauh dari tercapai karena beragam krisis sosial dan politik: peperangan, konflik, pelanggaran HAM, korupsi, serta runtuhnya kepercayaan terhadap institusi publik. Kekerasan struktural seperti ketimpangan dan diskriminasi semakin membuka ruang bagi konflik baru. Perdamaian sejati membutuhkan relasi sosial yang adil, institusi yang efektif, serta masyarakat yang mampu membangun kepercayaan dan solidaritas (Souiai et al., 2026, hlm.14). SDG 16 menempatkan masyarakat yang memiliki institusi yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik cenderung memiliki tingkat stabilitas sosial, kohesi masyarakat, serta pembangunan yang lebih berkelanjutan dibandingkan masyarakat dengan institusi yang lemah. Di sisi lain, buruknya tata kelola pemerintahan, maraknya korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik secara nyata menghalangi pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

Perdamaian tidak dapat hanya ditanggung negara atau lembaga internasional. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut partisipasi berbagai aktor sosial, termasuk komunitas keagamaan, dalam membangun rekonsiliasi, keadilan, dan kehidupan berkeadaban. Dalam perspektif eklesiologis, agama menjadi kekuatan sosial yang mampu mendorong dialog, memperkuat solidaritas, dan memulihkan relasi yang rusak. Penelitian Odak (2024 hlm.5) mengenai peran pemimpin agama dalam proses peacebuilding menemukan bahwa komunitas keagamaan memiliki kapasitas untuk menjembatani kelompok-kelompok yang berkonflik. Efektivitas peran tersebut ditentukan oleh komitmen teologis, kapasitas organisasi, kepemimpinan, serta praksis perdamaian yang relevan dengan konteks sosial. Dalam teologi Kristen, perdamaian menjadi bagian dari karya pendamaian Allah melalui Kristus yang memulihkan relasi antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Menurut Mashau (2024, hlm.81) Gereja tidak hanya dipanggil untuk mewartakan berita keselamatan, tetapi juga menghadirkan tanda-tanda perdamaian sebagai wujud nyata partisipasinya dalam misi Allah di tengah dunia.

Bagi kekristenan, keterlibatan gereja dalam membangun perdamaian ialah bagian dari identitas eklesiologisnya. Nanthambwe & Magezi (2024, hlm.4) memberikan pemahamana bahwa gereja dipahami sebagai komunitas orang percaya yang menerima panggilan dari Allah untuk mengambil bagian secara aktif dalam karya penyelamatan-Nya bagi dunia. Karena itu, keberadaan gereja senantiasa terkait dengan konteks masyarakat tempat ia hadir dan melayani. Dalam teologi kontemporer, eklesiologi tidak lagi terbatas pada kajian struktur atau organisasi, tetapi juga mencakup refleksi tentang bagaimana gereja menghidupi panggilannya di tengah dinamika sosial, budaya, dan politik. Perkembangan tersebut mencerminkan perubahan orientasi eklesiologi, dari penekanan pada aspek kelembagaan menuju pemahaman yang lebih berfokus pada relasi, konteks, dan partisipasi (Hopkins, 2021, hlm.5). Gereja dipandang sebagai komunitas yang terlibat

aktif di tengah kehidupan dunia. Menurut Setio (2022, hlm.17) Refleksi mengenai gereja selalu berkaitan dengan relasinya terhadap masyarakat, sebab gereja merupakan ruang tempat iman diwujudkan melalui kesaksian, pelayanan, dan keterlibatan dalam kehidupan bersama.

Pemahaman tersebut menemukan dasar teologisnya dalam konsep *shalom* yang menjadi salah satu tema sentral dalam narasi Alkitab. *Shalom* menggambarkan keadaan hidup yang utuh, harmonis, adil, dan sejahtera sebagaimana dikehendaki Allah bagi seluruh ciptaan. Konsep *shalom* menegaskan adanya pemulihan yang menyeluruh, mencakup hubungan manusia dengan Sang Pencipta, relasi antar sesama, serta keterikatannya dengan seluruh ciptaan. Dalam Perjanjian Baru, pemenuhan *shalom* mencapai puncaknya melalui karya pendamaian Kristus yang memperbarui hubungan manusia dengan Allah sekaligus membentuk komunitas baru yang hidup dalam kasih, keadilan, dan rekonsiliasi. Menurut Daniel Ronda (2025, hlm.256), Lebih dari sekadar gagasan teologis, shalom menjadi landasan kehidupan bergereja yang mendorong setiap orang percaya untuk mewujudkan rekonsiliasi, menegakkan keadilan, menghidupi kasih, serta membawa pengharapan di tengah masyarakat yang masih dibayangi konflik dan berbagai bentuk ketidakadilan. Sibagariang menegaskan (2025, hlm.33) identitas gereja diwujudkan sebagai komunitas yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui praktik perdamaian, hospitalitas, solidaritas, serta upaya memulihkan relasi di tengah keberagaman masyarakat.

Gereja sebagai komunitas *shalom* tidak hanya mengajarkan nilai perdamaian, tetapi juga menghidupinya dalam praksis sehari-hari. Gereja menjadi relevan ketika mampu membangun ruang dialog, memperjuangkan keadilan, merawat solidaritas, dan memulihkan relasi yang rusak akibat konflik. Identitas gereja ditentukan keterlibatannya dalam menghadirkan transformasi sosial yang mencerminkan nilai Kerajaan Allah. Pandangan Anthony & Patrick (2026, hlm.13), gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang secara aktif berpartisipasi dalam misi Allah bagi dunia melalui kesaksian yang bersifat transformatif, sehingga keberadaannya memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Menurut Sánchez-Camacho (2025, hlm.3) Eklesiologi memiliki dimensi publik yang menempatkan gereja sebagai bagian dari proses membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan bermartabat.

Kajian-kajian terdahulu mengindikasikan peran strategis gereja dalam mewujudkan perdamaian melalui refleksi teologis yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan yang kontekstual. Daniel Ronda (2025, hlm.249) menemukan konsep *shalom* merupakan fondasi teologis bagi rekonsiliasi karena menghadirkan pemulihan relasi antara Allah, manusia, dan ciptaan sebagai dasar kepemimpinan Kristen dalam masyarakat kontemporer. (Sibagariang, 2025, hlm.25) Identitas eklesiologi perdamaian perlu dibangun melalui integrasi nilai-nilai hospitalitas dan kearifan lokal sehingga gereja mampu menjadi agen perdamaian yang kontekstual. Sánchez-Camacho (2025, hlm.2) mengkaji *public theology* menempatkan gereja sebagai bagian dari ruang publik yang dipanggil untuk berdialog dengan berbagai persoalan sosial, politik, dan pembangunan berkelanjutan. Gereja mempunyai peran penting dalam proses penyembuhan memori kolektif serta rekonstruksi relasi antarumat beragama setelah konflik sosial (Tjandra, et al., 2025, hlm.6). Secara umum, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan berkembangnya perhatian akademik terhadap relasi antara gereja, perdamaian, dan kehidupan publik.

Kajian mengenai *shalom* telah menghubungkannya dengan rekonsiliasi, *peacebuilding*, kepemimpinan Kristen, dan transformasi kehidupan bersama. Menurut Shin, (2023, hlm.417) Kajian eklesiologi kontemporer juga telah memperluas perhatian gereja dari kehidupan internal komunitas menuju keterlibatan dalam kehidupan publik. Penelitian mengenai keterlibatan gereja dalam pembangunan berkelanjutan

menampilkan gereja lokal dapat berkontribusi terhadap berbagai agenda SDGs, termasuk isu perdamaian dan keadilan yang berkaitan dengan SDG 16 (Msebi & Beukes, 2024, hlm.6). Masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan konsep *shalom*, identitas eklesiologis gereja, dan SDG 16 ke dalam satu kerangka teologis yang secara khusus menjelaskan respons gereja terhadap krisis perdamaian sosial. Adehanloye & Sakupapa (2026, hlm.2) memperlihatkan meskipun penelitian mengenai eklesiologi dan transformasi konflik telah berkembang, termasuk kajian yang mengembangkan model eklesial berbasis *shalom* dalam konteks tertentu dalam integrasi *shalom*, eklesiologi, dan SDG 16 dalam konteks krisis perdamaian sosial masih memerlukan pengembangan konseptual lebih lanjut. Masih terbuka peluang untuk mengembangkan penelitian yang memadukan ketiga dimensi tersebut sehingga gereja tidak hanya dipahami sebagai aktor pembangunan sosial, tetapi juga sebagai komunitas iman yang menghadirkan *shalom* sebagai perwujudan Kerajaan Allah dalam merespons krisis perdamaian sosial (Anthony & Patrick, 2026, hlm.13). Celah penelitian tersebut menjadi dasar kebaruan penelitian ini, yaitu menawarkan konstruksi eklesiologis yang menghubungkan konsep *shalom* dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui perspektif SDG 16.

Penelitian ini berangkat dari tesis bahwa gereja sebagai komunitas *shalom* dipanggil untuk menghadirkan kehadiran Kerajaan Allah melalui praksis perdamaian, keadilan, rekonsiliasi, dan transformasi sosial sebagai bentuk partisipasi dalam misi Allah bagi dunia (Sasongko, 2022, hlm.1). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut: bagaimana gereja sebagai komunitas *shalom* dapat dikonstruksikan secara eklesiologis untuk merespons krisis perdamaian sosial melalui dimensi rekonsiliasi, keadilan dan solidaritas, dialog dan partisipasi publik, serta pembentukan karakter perdamaian dalam perspektif SDG 16? Berangkat dari pertanyaan penelitian tersebut, kajian ini bertujuan mengkaji konsep gereja sebagai komunitas *shalom* dalam perspektif eklesiologi, menguraikan relevansinya terhadap krisis perdamaian sosial, serta menjelaskan kontribusi teologis gereja bagi penerapan nilai-nilai SDG 16. Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan eklesiologi kontekstual melalui pemaduan konsep *shalom* dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Adapun pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan menyediakan landasan reflektif bagi gereja untuk membangun pelayanan yang semakin transformatif, responsif terhadap konteks, dan berorientasi pada penguatan perdamaian dalam masyarakat yang majemuk.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai landasan utama dalam proses penelitian. Pendekatan ini dipilih mengingat kajian berorientasi pada analisis berbagai konsep teologis, terutama yang berkaitan dengan gereja sebagai komunitas *shalom*, eklesiologi, serta keterkaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembahasan disusun melalui telaah kritis terhadap literatur yang secara langsung mendukung tujuan dan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian kualitatif, perhatian utama diarahkan pada upaya memahami makna, konteks, dan keterkaitan antarkonsep secara mendalam guna menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji melalui sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk mengkaji persoalan teologis yang bersifat konseptual, kontekstual, dan interpretatif (Moschella & Willhauck, 2018, hlm.12).

Landasan data penelitian diperoleh dari dua kelompok rujukan, yakni bahan utama yang menjadi dasar analisis serta literatur pendukung yang melengkapi pembahasan. Sebagai rujukan utama, penelitian ini menempatkan Alkitab sebagai pijakan

normatif dalam membangun argumentasi teologis dan dokumen *Sustainable Development Goal* (SDGs), khususnya SDG 16 tentang *Peace, Justice, and Strong Institutions*. Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku teologi, buku-buku eklesiologi, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas konsep *shalom*, eklesiologi, teologi publik, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Data penelitian diperoleh melalui proses identifikasi, penyaringan, dan evaluasi kritis terhadap berbagai referensi yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, sehingga seluruh informasi yang digunakan memiliki relevansi, kredibilitas, serta mampu memperkuat argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini (Malahati et al.,2023, hlm.342).

Data dianalisis dengan metode deskriptif-interpretatif. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep utama terkait gereja, *shalom*, eklesiologi, krisis perdamaian sosial, dan SDG 16 dari berbagai sumber. Konsep-konsep tersebut kemudian dideskripsikan secara sistematis dan diinterpretasikan melalui dialog kritis antarsumber untuk menemukan hubungan, persamaan, dan perbedaan. Hasil interpretasi selanjutnya disintesiskan menjadi argumentasi teologis mengenai respons eklesiologis gereja sebagai komunitas *shalom* terhadap krisis perdamaian sosial dalam perspektif SDGs. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual sesuai tujuan.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Biblis-Teologis

Shalom merupakan konsep teologis penting dalam Perjanjian Lama yang memiliki makna lebih luas daripada sekadar "damai". Istilah ini menunjuk pada keadaan yang utuh, aman, sejahtera, dan selaras dengan kehendak Allah. *Shalom* mencakup kualitas relasi manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan, sehingga menggambarkan kehidupan yang berada dalam pemeliharaan dan berkat Allah. Pemahaman tersebut terlihat dalam Bilangan 6:24-26, ketika *shalom* ditempatkan sebagai puncak berkat yang diterima umat dari Allah. Shalom berhubungan dengan penyertaan, kasih karunia, dan pemeliharaan Allah terhadap umat-Nya. Konsep ini juga memiliki dimensi keadilan. Yesaya 32:17 menghubungkan *shalom* dengan keadilan, sehingga perdamaian dalam perspektif biblis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar dan adil. *Shalom* karena itu mencakup pemulihan kehidupan bersama yang berakar pada kehendak Allah. *Shalom* sebagai gambaran kehidupan yang dipulihkan, di mana perdamaian berkaitan dengan keutuhan relasi manusia dengan Allah dan sesama (Silalahi, 2025, hlm.41). *Shalom* menjadi cara hidup yang mencerminkan karakter Allah di tengah dunia (Daniel Ronda, 2025, hlm.255).

Pemahaman mengenai *shalom* memperoleh penegasan dalam pengajaran Yesus. Matius 5:9 : "*Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah*" (*Alkitab*, 2023, Mat. 5:9). Ayat ini merupakan bagian dari Khotbah di Bukit yang menggambarkan karakter warga Kerajaan Allah. Yesus menyebut mereka yang secara aktif menjadi pembawa damai (*peacemakers*), yaitu orang-orang yang menghadirkan rekonsiliasi, memulihkan relasi yang rusak, serta memperjuangkan keadilan dan kasih di tengah kehidupan bersama. Sebutan "anak-anak Allah" memperlihatkan tindakan membawa damai merupakan cerminan karakter Allah sendiri sebagai sumber damai. Panggilan menjadi pembawa damai merupakan bagian dari identitas komunitas murid Kristus. Menurut Jonidius Illu et al., (2025, hlm.255) dalam perspektif eklesiologis, gereja dipanggil menghadirkan *shalom* secara nyata melalui kesaksian, pelayanan, rekonsiliasi, dan perjuangan bagi keadilan, sehingga gereja sungguh menjadi komunitas *shalom* yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia yang masih diliputi konflik dan perpecahan.

Manifestasi Krisis *Shalom* dalam Kehidupan Kontemporer

Krisis *shalom* dalam kehidupan kontemporer dapat dilihat melalui kekerasan, fragmentasi sosial, serta melemahnya keadilan dan kepercayaan terhadap institusi. Konflik Israel-Palestina dan konflik bersenjata di Papua, misalnya, memperlihatkan bahwa persoalan perdamaian tidak cukup dipahami sebagai penghentian kekerasan. Konflik juga menghasilkan kerusakan relasi, trauma, perpindahan penduduk, serta hilangnya kepercayaan antarkelompok dan terhadap institusi yang seharusnya menjamin keamanan dan keadilan. Dalam perspektif teologi *shalom*, perdamaian memiliki cakupan yang lebih luas daripada ketiadaan konflik, karena mencakup pemulihan relasi dan kehidupan bersama secara utuh. Ronda (2025, hlm.249) menempatkan *shalom* dalam hubungan dengan rekonsiliasi dan pemulihan relasi, sehingga perdamaian tidak berhenti pada penghentian konflik, tetapi berkaitan dengan upaya memulihkan kehidupan bersama yang rusak. Konflik bersenjata dapat dipahami sebagai manifestasi krisis *shalom* ketika relasi yang seharusnya menopang kehidupan bersama digantikan oleh kekerasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan. Perdamaian membutuhkan proses pemulihan relasi yang menyentuh kehidupan manusia secara lebih menyeluruh.

Dikaitkan dengan SDG 16, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kontribusi gereja melalui **rekonsiliasi dan pemulihan relasi** sebagai salah satu respons eklesiologis terhadap krisis *shalom*. Rekonsiliasi berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif dengan memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik, mengurangi permusuhan antarkelompok, dan membangun kembali kepercayaan dalam kehidupan bersama. Gereja dapat mengambil bagian melalui pendampingan terhadap kelompok yang mengalami konflik, pengembangan ruang perjumpaan, serta upaya membangun hubungan yang dilandasi pengampunan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa respons gereja terhadap konflik memiliki relevansi dengan tujuan SDG 16 dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif. *Shalom* karena itu menjadi dasar teologis bagi gereja untuk menghadirkan rekonsiliasi sebagai praksis nyata dalam merespons kerusakan relasi sosial.

Manifestasi berikutnya tampak dalam polarisasi sosial dan politik yang memperkuat batas-batas identitas, mempersempit ruang dialog, dan melemahkan solidaritas. Polarisasi dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi salah satu gambaran bagaimana perbedaan pilihan politik dapat berkembang menjadi fragmentasi dalam kehidupan sosial. Ketika perbedaan pilihan berubah menjadi prasangka dan permusuhan, ruang publik kehilangan fungsi sebagai tempat perjumpaan dan dialog antarkelompok. Dalam perspektif public theology, Sánchez-Camacho (2025, hlm.9) memperlihatkan keterlibatan gereja di ruang publik berkaitan dengan upaya membangun dialog, tanggung jawab bersama, dan kehidupan sosial yang menghargai martabat manusia. Kondisi tersebut dapat dibaca sebagai krisis *shalom* pada dimensi relasional dan komunal karena kehidupan bersama mengalami fragmentasi dan kehilangan orientasi pada kesejahteraan bersama. Persoalan polarisasi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pandangan politik, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat mempertahankan relasi yang memungkinkan perbedaan hadir tanpa berubah menjadi permusuhan.

Krisis *shalom* juga tampak dalam korupsi, intoleransi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang melemahkan keadilan serta kepercayaan sosial. Fenomena tersebut memperlihatkan kerusakan kehidupan bersama tidak hanya terjadi melalui kekerasan terbuka, tetapi juga melalui praktik yang merusak integritas relasi sosial dan institusi. Korupsi, misalnya, merusak kepercayaan terhadap institusi dan memperlemah prinsip keadilan, sedangkan intoleransi, disinformasi, dan ujaran kebencian dapat memperkuat prasangka serta memperdalam perpecahan antarkelompok (Thanetsunthorn, 2022,

hlm.49). Dalam kerangka teologi *shalom*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai kerusakan pada relasi antarmanusia dan tatanan kehidupan bersama yang seharusnya ditandai oleh keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, krisis perdamaian tidak cukup dipahami sebagai persoalan hukum, politik, atau keamanan, tetapi juga sebagai persoalan relasional yang memengaruhi kualitas kehidupan bersama. Analisis ini menjadi dasar untuk melihat kebutuhan akan respons eklesiologis yang berorientasi pada pemulihan relasi, penguatan solidaritas, pembentukan kehidupan bersama yang adil, serta keterlibatan gereja dalam membangun perdamaian.

Dinamika Kerusakan Relasi Sosial

Krisis perdamaian global maupun nasional tidak berhenti pada konflik, tetapi berkembang menjadi kerusakan relasi sosial yang mendalam. Dampak utamanya terlihat dalam menurunnya kepercayaan publik terhadap sesama, institusi, dan mekanisme sosial yang menopang kehidupan bersama. Ketika masyarakat terus dihadapkan pada perang, kekerasan, korupsi, polarisasi politik, dan disinformasi, relasi yang semestinya dibangun atas dasar kepercayaan berubah menjadi kecurigaan dan sikap defensif. Kondisi tersebut membuat kerja sama, penyelesaian konflik secara damai, serta partisipasi sosial semakin sulit diwujudkan. Kepercayaan sosial merupakan unsur penting dalam tata kelola yang inklusif karena mendorong partisipasi warga, memperkuat legitimasi institusi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif. Rendahnya kepercayaan sosial menghambat keterlibatan warga dalam kehidupan publik dan memperlemah efektivitas lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan perdamaian (Souiai et al., 2026, hlm.9). Anugerah Allah tidak hanya membentuk relasi personal manusia dengan Allah, tetapi juga menuntut terbentuknya kehidupan sosial yang saling bergantung (*interdependence*) dan mencerminkan nilai kasih karunia dalam komunitas manusia (Carpenter, 2024, hlm.125). Ketika relasi sosial kehilangan kepercayaan, yang mengalami kerusakan adalah dasar etis kehidupan bersama yang seharusnya mencerminkan anugerah Allah dalam ruang publik.

Kerusakan relasi tersebut memperlihatkan pentingnya dimensi rekonsiliasi dan pemulihan relasi sebagai salah satu bentuk kontribusi shalom terhadap SDG 16, khususnya target 16.7 yang menekankan pengurangan segala bentuk kekerasan dan pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif. Pemulihan kepercayaan menjadi bagian penting dari proses tersebut karena masyarakat yang mengalami konflik, kekerasan, dan fragmentasi membutuhkan ruang untuk membangun kembali hubungan yang rusak, mengurangi kecurigaan, dan memulihkan kemampuan untuk hidup bersama. Gereja dapat berkontribusi melalui pendampingan terhadap kelompok yang mengalami konflik, pembentukan ruang perjumpaan dan dialog, penguatan kehidupan komunitas, serta praktik pengampunan dan rekonsiliasi yang menghormati martabat setiap manusia. Kontribusi tersebut juga berkaitan dengan target 16.7, yang menekankan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif, sebab pemulihan relasi sosial dapat membuka kembali ruang keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bersama. Gereja sebagai komunitas shalom dipanggil untuk membangun kepercayaan dan solidaritas sehingga perdamaian tidak hanya dipahami sebagai berhentinya kekerasan, tetapi sebagai pemulihan hubungan yang memungkinkan masyarakat hidup secara adil, damai, dan iklusif.

Pudarnya solidaritas sosial akibat individualisme, eksklusivisme, dan fragmentasi masyarakat adanya krisis *koinonia*. Polarisasi politik dan sosial menciptakan batas identitas yang menumbuhkan kecurigaan, menyempitkan ruang dialog, melemahkan kerja sama, serta mengutamakan kepentingan kelompok di atas kesejahteraan bersama, sehingga kehidupan persekutuan sebagai dasar relasi sosial semakin rapuh (Beck, 2024,

hlm.29). Dalam perspektif eklesiologis, Labobar (2024, hlm.505) menandakan *koinonia* merupakan dimensi penting dalam memahami respons gereja terhadap keretakan relasi sosial. *Koinonia* mengarah kepada kehidupan bersama yang dibangun melalui relasi, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Gereja yang menghadirkan keadilan dibangun melalui relasi setara, saling memberdayakan, serta berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan komunitas. Keadilan terwujud ketika komunitas membangun relasi utuh, memperkuat kerja sama lintas kelompok, dan bersama mengatasi penderitaan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memaknai penguatan solidaritas sebagai bagian dari respons eklesiologis terhadap fragmentasi sosial. Secara teologis, respons tersebut berakar pada pemahaman gereja sebagai komunitas yang menghadirkan kehidupan bersama yang dilandasi kasih, keadilan, dan solidaritas.

Melemahnya keadilan sebagai fondasi kehidupan bersama tampak dalam praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, dan ketimpangan akses sumber daya. Kondisi tersebut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya prinsip persamaan hak dalam penegakan hukum serta mengurangi peluang untuk memperoleh kesejahteraan secara adil. Ketidakadilan pun berkembang menjadi persoalan struktural yang merusak kualitas relasi antarmanusia. Reventlow (2026, hlm.18) menegaskan bahwa berbagai krisis global, mulai dari otoritarianisme, ketimpangan ekonomi, hingga melemahnya perlindungan hak dasar, memerlukan keadilan transformatif yang tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi diwujudkan melalui perubahan struktur sosial yang memulihkan martabat manusia dan menjamin partisipasi setiap orang dalam kehidupan bersama. Integritas institusi, transparansi, pemberantasan korupsi, dan tata kelola yang inklusif merupakan prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang damai dan berkelanjutan (Souiai et al., 2026, hlm.6). Ketika integritas kelembagaan melemah, kepercayaan masyarakat ikut menurun, partisipasi publik berkurang, dan konflik sosial semakin mudah berkembang. Melemahnya keadilan tidak hanya memperburuk kualitas pemerintahan, tetapi juga memperdalam kerusakan relasi sosial karena masyarakat kehilangan dasar moral yang memungkinkan mereka hidup dalam rasa saling percaya, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.

Puncak dari dinamika kerusakan relasi sosial tampak pada tergerusnya martabat manusia sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah. Dalam situasi ketika kebencian, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan terus dipelihara, manusia tidak lagi diperlakukan sebagai sesama yang memiliki nilai intrinsik, melainkan sebagai objek kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis. Akibatnya, relasi yang semestinya dibangun di atas kasih berubah menjadi relasi yang didominasi oleh dominasi, eksklusi, dan eksploitasi. Woruntu et al., (2025, hlm.4164) memaparkan rekonsiliasi Kristen tidak berhenti pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi menuntut pemulihan hubungan antarmanusia melalui pengampunan, penghormatan terhadap martabat setiap pribadi, serta pembentukan komunitas yang mampu hidup dalam kasih dan tanggung jawab bersama. Kasih karunia Allah memiliki dimensi sosial yang menuntut manusia menghidupi relasi yang saling bergantung (*interdependence*), sehingga kehidupan bersama tidak dibangun atas dasar prestasi, kekuasaan, atau kepentingan diri, melainkan atas pengakuan bahwa setiap manusia menerima martabatnya sebagai anugerah Allah (Carpenter, 2024, hlm.97). Tergerusnya martabat manusia menjadi indikator terdalam kerusakan relasi sosial, sebab krisis perdamaian tidak hanya menghancurkan struktur sosial-politik, tetapi juga merusak cara manusia memandang sesamanya (Hermans, 2025, hlm.140). Akar persoalan perdamaian hilangnya relasi yang berlandaskan keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rekonstruksi perdamaian menuntut pendekatan eklesiologis, dengan menghadirkan gereja sebagai komunitas yang menghidupi rekonsiliasi, keadilan, dan kehidupan bersama secara nyata.

Rekonstruksi Perdamaian dalam Perspektif Eklesiologis

Jamir (2024, hlm.40) membuktikan krisis perdamaian tidak dapat dipulihkan hanya melalui pendekatan politik, hukum, ataupun keamanan, sebab akar persoalannya terletak pada kerusakan relasi yang melibatkan manusia dengan Allah, sesama, dan kehidupan bersama. Rekonstruksi perdamaian menuntut keterlibatan gereja sebagai tubuh Kristus yang dipanggil untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Identitas gereja sebagai komunitas iman diwujudkan melalui panggilan untuk membangun rekonsiliasi, memperjuangkan keadilan, serta memulihkan relasi yang telah rusak akibat konflik, kekerasan, dan ketidakadilan. Dalam konteks tersebut, gereja dipanggil mengembangkan ruang dialog yang inklusif, mendampingi pihak-pihak yang mengalami konflik, membentuk karakter yang menolak korupsi dan kekerasan, mengembangkan pendidikan perdamaian, serta membangun etika politik yang menghargai martabat manusia. Labobar (2024, hlm.504) menegaskan misi gereja pada hakikatnya adalah misi rekonsiliasi yang bersumber dari karya Allah sendiri, sehingga kehadiran gereja harus tampak melalui tindakan nyata yang memulihkan hubungan antarmanusia dan menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat. Gereja yang setia pada Injil dipanggil membangun komunitas yang menghidupi keadilan secara kolektif melalui relasi yang saling memberdayakan, kepemimpinan yang partisipatif, dan kerja sama lintas komunitas demi menghadirkan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Rekonstruksi perdamaian tersebut sekaligus memperlihatkan relevansi eklesiologi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goal* 16, yaitu membangun masyarakat yang damai, adil, inklusif, serta memiliki institusi yang efektif, akuntabel, dan kuat. Dalam konteks ini, kontribusi gereja terhadap pencapaian SDG 16 tidak terletak pada pengambilalihan fungsi negara atau menggantikan peran institusi publik, melainkan pada kapasitas gereja dalam membentuk manusia dan komunitas yang menghidupi nilai-nilai keadilan, integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Gereja dapat berkontribusi dengan membangun kesadaran bahwa perdamaian merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kehidupan komunitas sehari-hari. Pembentukan warga gereja tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan iman secara personal, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mampu menghargai perbedaan, menolak kekerasan, serta memperjuangkan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Dalam kerangka tersebut, gereja dipanggil menjadi ruang pembentukan karakter yang menolak korupsi, merawat toleransi, memperkuat dialog lintas agama, serta mendorong partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan gerejawi, pembinaan warga jemaat, pelayanan sosial, dialog antarkelompok, serta keterlibatan dalam berbagai persoalan masyarakat. Gereja tidak hanya berbicara mengenai perdamaian sebagai suatu nilai teologis, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam praktik kehidupan bersama. Keterlibatan gereja di ruang publik merupakan bentuk kesaksian iman yang diwujudkan melalui tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Gereja hadir sebagai komunitas iman yang menjadi mitra dalam membangun kehidupan publik yang damai, adil, inklusif, dan bermartabat. Komunitas Kristen dipanggil untuk merespons berbagai krisis sosial dengan meneladani Kristus Sang Pembebas melalui pemberitaan perdamaian, perjuangan bagi keadilan, serta tindakan nyata yang menghadirkan pengharapan dan solidaritas bagi mereka yang menderita (TriaTmojo, 2024, hlm.90). Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila rekonsiliasi, keadilan, partisipasi masyarakat, dan kerja sama lintas pemangku kepentingan berjalan secara terpadu. Gereja sebagai komunitas *shalom* dipanggil tidak hanya memberitakan Injil perdamaian, tetapi juga menghadirkannya melalui tindakan nyata yang memperkuat kehidupan bersama,

sehingga kesaksian gereja menjadi kontribusi konkret bagi terwujudnya masyarakat yang damai, adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi SDG 16.

Kesimpulan

Gereja sebagai komunitas *shalom* memiliki dasar eklesiologis untuk merespons krisis perdamaian sosial melalui penghayatan identitas dan misinya dalam kehidupan bersama. Respons eklesiologis gereja sebagai komunitas *shalom* dirumuskan dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) rekonsiliasi dan pemulihan relasi; (2) keadilan dan solidaritas sosial; (3) dialog dan partisipasi publik; serta (4) pendidikan perdamaian dan kehidupan komunal. Keempat dimensi tersebut menggambarkan cara gereja menghadirkan *shalom* dalam merespons kerusakan relasi, melemahnya solidaritas, ketidakadilan, serta berbagai bentuk krisis perdamaian sosial. Keempat respons tersebut menampilkan kontribusi gereja terhadap SDG 16, khususnya dalam membangun perdamaian, keadilan, dan masyarakat yang inklusif, berakar pada identitas dan misi gereja. Gereja dapat mengambil peran sebagai komunitas iman sekaligus subjek aktif dalam pembangunan perdamaian melalui rekonsiliasi, penguatan solidaritas, perjuangan keadilan, dialog, partisipasi publik, serta pendidikan perdamaian. Perspektif ini memperkaya pengembangan eklesiologi kontekstual dengan menghubungkan konsep *shalom* dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan kehidupan sosial masyarakat. Keempat dimensi tersebut dapat menjadi pijakan reflektif bagi gereja dalam mengembangkan pelayanan dan praksis sosial yang berorientasi pada perdamaian. Gereja didorong untuk memulihkan relasi, membangun kehidupan komunal yang dilandasi solidaritas dan keadilan, membuka ruang dialog dan partisipasi, serta membentuk karakter perdamaian dalam kehidupan bersama. Panggilan gereja dalam menghadapi krisis perdamaian merupakan bagian dari praksis eklesiologis yang berakar pada identitas gereja sebagai komunitas *shalom*. Penelitian ini masih menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga penerapan keempat dimensi tersebut dalam praktik bergereja belum dianalisis secara empiris. Penelitian selanjutnya dapat menguji dan mengembangkan kerangka tersebut melalui studi empiris mengenai praksis gereja sebagai komunitas *shalom* dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

References

Adehanloye, O. P., & Sakupapa, T. C. (2026). Understanding the ecclesial model of conflict transformation from a study of the Nigerian Baptist Convention in Northern Nigeria. *Verbum et Ecclesia*, *47*(1), 1–8. https://doi.org/10.4102/ve.v47i1.3598

Anthony, F.-V., & Patrick, G. (Ed.). (2026). *Theology "In Exit" for a Better World: Consolidating the Intersecting Features of Public Theology*. MDPI. https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-6595-6

Beck, M. A. (with Hand, S. M.). (2024). *Doing Justice Together: Fresh Expressions Pathways for Healing in Your Church* (1st ed). Abingdon Press.

Camorongan, J. R. (2023). Peace, Justice, and Strong Institutions: Catalysts for Sustainable Development – The Case of SDG 16 Implementation in the Philippines. *International Journal of Policy Studies*, *3*(1).

Carpenter, A. D. (2024). *Grace and social ethics: Gift as the foundation of our life together*. Baker Academic, a division of Baker Publishing Group.

Daniel Ronda. (2025). Shalom as a Theological Foundation for Reconciliation: Implications for Christian Leadership in Contemporary Indonesian Society. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.46445/ejti.v9i2.834

Hermans, C. (2025). Public Theology and Human Dignity: Critique, New Directions and Methodological Considerations. *Religion & Theology*, *32*(1–2). https://doi.org/10.1163/15743012-bja10091

Hopkins, T. J. (2021). *Christ, church, and world: Bonhoeffer and Lutheran ecclesiology after Christendom*. Lexington Books/Fortress Academic. https://doi.org/10.5040/9781978719415

Jamir, C. (2024). Breaking the cycle of violence: The church as a space for dialogue towards restorative reconciliation, justice, and forgiveness in Naga society. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, *41*(1). https://doi.org/10.1177/02653788231225953

Jansen Reventlow, N. (2026). *Radical justice: Building the world we need*. Pluto Press.

Kuenkel, P., Kühn, E., Stucker, D., & Williamson, D. F. (2020). *Leading Transformative Change Collectively: A Practitioner Guide to Realizing the SDGs* (1 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003033561

Labobar, K. (2024). Misi dan rekonsiliasi: Merevitalisasi fungsi gereja di tengah konflik sosial. *KURIOS*, *10*(2), 501–510. https://doi.org/10.30995/kur.v10i2.1145

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR*, *11*(2), 341–348. https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902

Mashau, T. D. (2024). "Taking up a sword": A missiological reflection of violence in Gaza in the light of a missional reading of Luke 22:47–53 and global sustainability. *Missionalia*, *52*(1), 81–98. https://doi.org/10.7832/52-0-523

Moschella, M. C., & Willhauck, S. (Ed.). (2018). *Qualitative research in theological education: Pedagogy in practice*. SCM Press.

Msebi, M., & Beukes, J. W. (2024). Sustainable Development Goals through the Lens of Local Churches: An Interdisciplinary Study. *Verbum et Ecclesia*, *45*(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/ve.v45i1.3310

Nanthambwe, P., & Magezi, V. (2024). Bringing faith to the public: Positioning church communities for social good in sub-Saharan Africa. *Theologia Viatorum*, *48*(1). https://doi.org/10.4102/tv.v48i1.272

Odak, S. (2024). Why Do They Not Do More? Analyzing Peacebuilding Actions of Religious Leaders during and after Violent Conflicts. *Religions*, *15*(1), 116. https://doi.org/10.3390/rel15010116

Radovic, V. M. (2019). *SDG16 - Peace and Justice: Challenges, Actions and the Way Forward* (1st ed). Emerald Publishing Limited.

Sánchez-Camacho, J. (2025). The Contemporary Discourse of Public Theology in the Face of Technological and Socio-Environmental Crises. *Religions*, *16*(7), 923. https://doi.org/10.3390/rel16070923

Sasongko, N. (2022). The Surviving Church: Kairos and Eschatology in Paul Tillich and Raimon Panikkar and Postpandemic Ecclesiology. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, *21*(2), 161–178. https://doi.org/10.36421/veritas.v21i2.609

Setio, R. (2022). Mencari Eklesiologi yang Hidup. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, *7*(1), 1–19. https://doi.org/10.30648/dun.v7i1.732

Shin, J. J. (2023). Casting a Vision of Communal and Public Life of the Church for the Post-Pandemic Korean-American Churches: Focusing on Veli-Matti Kärkkäinen's Communion and Public Ecclesiology. *International Bulletin of Mission Research*, *47*(3), 416–429. https://doi.org/10.1177/23969393221139456

Sibagariang, J. S. (2025). Merakit Identitas Eklesiologi Perdamaian: Integrasi Kearifan Lokal Paramak So Balunon dan Hospitalitas dalam Tradisi Gereja. *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, *6*(1), 23–37. https://doi.org/10.34307/sophia.v6i1.318

Souiai, M., Alkhowar, H., Al-Obaidli, H., Al-Muhannadi, M., Alkhelaifi, N., Al-Kubaisi, M., Al-Khayareen, N., Al-Sahoti, S., & Hahladakis, J. N. (2026). Peace and Inclusive Governance in Sustainable Development: Strengthening Institutions and Environmental Services. *Sustainable Development*, sd.71330. https://doi.org/10.1002/sd.71330

Thanetsunthorn, N. (2022). Corruption and social trust: The role of corporate social responsibility. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, *31*(1). https://doi.org/10.1111/beer.12380

Tjandra, Y., Sunkudon, P. G. O., & Baginda, L. M. (2025). Kairos in Poso: Towards a contextual theology of peace after religious conflict. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *81*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10768

TriaTmojo, E. E. (2024). *Solidaritas allah oleh Choan seng song, serta kaitannya*. *4*.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2026). *The Sustainable Development Goals Report 2026*. United Nations.

Woruntu, V. V., Tumiwa, E. S. E., Komaling, O. N., & Sandiata, S. E. (2025). Christian Forgiveness, Reconciliation, and Congregational Life: Quantitative Evidence from GMIM Churches in Indonesia. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*.